



ບັນທຶກ ກຽມໃຫ້  
PEMERINTAH PROVINSI BALI  
ສາທາລະນະລາຊະອານາຈັກ ບາລີ ປຣາ

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

ຄະນະກຳມະການ ຫຼື ບັນຊາ ສາທາລະນະລາຊະອານາຈັກ ບາລີ (ບັນຊາ) ສາທາລະນະລາຊະອານາຈັກ  
Jalan D.I. Panjaitan Nomor 10 Denpasar - Bali (80235) Telepon; (0361) 245396  
Website : [www.satpolpp.baliprov.go.id](http://www.satpolpp.baliprov.go.id)

Bali, 7 Pebruari 2023

Nomor : B.36.000/785/Bid.IV/Satpol. PP.  
Sifat : Biasa  
Lampiran : (1) Gabung  
Hal : Daftar Informasi Publik dan Usulan  
Informasi yang Dikecualikan

Kepada  
Yth. Kepada Dinas Komunikasi,  
Informasi dan Statistik  
Provinsi Bali

di -  
TEMPAT

Memenuhi Surat Nomor B.24.000/1569/IKP/D.KOMINFOS,  
tanggal 1 Pebruari 2023, Hal Daftar dan Usulan Informasi yang  
Dikecualikan, bersama ini kami sampaikan Daftar dimaksud pada Satuan  
Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2023 (Daftar Terlampir).

Demikian disampaikan untuk dapat digunakan semestinya, Terima  
kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh :  
KEPALA SATUAN  
I Dewa Nyoman Rai Dharmadi  
NIP. 19721216 199803 1 006



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Lampiran Surat Nomor : B.36.000/785/Bid.IV/Satpol. PP  
Tanggal 8 Pebruari 2023.

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI  
TAHUN 2023**

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Waktu Pembuatan	Bentuk Informasi		Retensi Arsip
				Cetak	Soft-copy	
1.	Kedudukan/ Domisili	Berisi tentang kedudukan, domisili alamat lengkap Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	2023	V	V	Aktif
2.	Struktur Organisasi	Memuat struktur organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	2023	V	V	Aktif
3.	Visi dan Misi	Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	2023	V	V	Aktif
4.	Tugas Pokok dan Fungsi	Memuat informasi tentang tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	2023	V	V	Aktif
5.	Maklumat Pelayanan	Memuat informasi berupa pelayanan Informasi	2022	V	V	Aktif
6.	Daftar Pegawai	Memuat Informasi terkait jumlah pegawai, komposisi status kepegawaian	2023	V	V	Aktif
7.	Pembagian unit kerja	Memuat informasi tupoksi Unit Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Prov Bali	2023	V	V	Aktif
8.	Program dan Kegiatan	Memuat program dan kegiatan utama di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	2023	V	V	Aktif
9.	Rencana Kerja Strategis 2018-2023	Memuat informasi mengenai Rencana Kerja Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	2018	V	V	Aktif
10.	SOP Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Memuat informasi mengenai Standar Operasional Operasional Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2023	V	V	Aktif
11.	SOP Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Memuat informasi mengenai Standar Operasional Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2023	V	V	Aktif
12.	SOP Kegiatan Penyediaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Memuat informasi mengenai Standar Operasional Penyediaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2023	V	V	Aktif
13.	SOP Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Memuat informasi mengenai Standar Operasional Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	2023	V	V	Aktif
14.	SOP Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Memuat informasi mengenai Standar Operasional Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2023	V	V	Aktif



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

15.	SOP Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Memuat informasi mengenai Standar Operasional Penyediaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2023	V	V	Aktif
16.	SOP Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Memuat informasi mengenai Standar Operasional Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2023	V	V	Aktif
17.	SOP Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Memuat informasi mengenai standar operasional Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2023	V	V	Aktif
18.	SOP Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Memuat informasi mengenai standar operasional Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	2023	V	V	Aktif
19.	SOP Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Memuat informasi mengenai standar Operasional Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	2023	V	V	Aktif
20.	SOP Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Memuat informasi mengenai standar Operasional Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2023	V	V	Aktif
21.	SOP Penyediaanm Jasa Pelayanan Umum Kantor	Memuat informasi mengenai standar operasional Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2023	V	V	Aktif
22.	SOP Pemeliharaan, Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Memuat informasi mengenai standar operasional Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2023	V	V	Aktif
23.	SOP Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Memuat informasi mengenai standar operasional Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya	2023	V	V	Aktif
24.	SOP Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan.	Memuat informasi mengenai standar operasional Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan.	2023	V	V	Aktif
25.	SOP Pemberdayaan Perlindungan masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Memuat informasi mengenai standar operasional Pemberdayaan Perlindungan masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum.	2023	V	V	Aktif
26.	SOP Kerja Sama antar Lembaga dan kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Memuat informasi mengenai standar operasional Kerja Sama antar Lembaga dan kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2023	V	V	Aktif



27.	SOP Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Memuat informasi mengenai standar operasional Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	2023	V	V	Aktif
28.	SOP Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.	Memuat informasi mengenai standar operasional Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.	2023	V	V	Aktif
29.	SOP Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Memuat informasi Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	2023	V	V	Aktif
30.	SOP Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas bernuansa HAM	Memuat informasi Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas bernuansa HAM	2023	V	V	Aktif
31.	Pengembangan Kapasitas Karier PPNS	Memuat Informasi Pengembangan Kapasitas Karier PPNS	2023	V	V	Aktif
32.	KAK Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Memuat suatu dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran yang akan dicapai Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2023	V	V	Aktif
33.	KAK Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Memuat suatu dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran yang akan dicapai Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2023	V	V	Aktif
34.	KAK Kegiatan Penyediaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Memuat suatu dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran yang akan dicapai kegiatan Penyediaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2023	V	V	Aktif
35.	KAK Sub Kegiatan n Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Memuat suatu dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran yang akan dicapai Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	2023	V	V	Aktif
36.	KAK Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Memuat suatu dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran yang akan dicapai Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2023	V	V	Aktif
37..	KAK Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Memuat suatu dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran yang akan dicapai Sub Kegiatan Penyediaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2023	V	V	Aktif
38.	KAK Sub Kegiatan Penyediaan Barang dan	Memuat suatu dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran yang akan dicapai Sub Kegiatan Penyediaan Barang	2023	V	V	Aktif



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

38.	KAK Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Memuat suatu dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran yang akan dicapai Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2023	V	V	Aktif
39.	KAK Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Memuat suatu dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran yang akan dicapai Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	2023	V	V	Aktif
40.	KAK Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Memuat suatu dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran yang akan dicapai Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	2023	V	V	Aktif
41.	KAK Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Memuat suatu dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran yang akan dicapai kegiatan Sub Kegiatan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2023	V	V	Aktif
42.	KAK Sub Kegiatan Penyediaanm Jasa Pelayanan Umum Kantor	Memuat suatu dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran yang akan dicapai Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2023	V	V	Aktif
43.	KAK Sub Kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Memuat suatu dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran yang akan dicapai Sub Kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2023	V	V	Aktif
	KAK Sub Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor	Memuat suatu dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran yang akan dididapai sub kegiatan Pemeliharaan gedung Kantor.	2023	V	V	Aktif
44.	KAK Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan.	Memuat suatu dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran yang akan dicapai kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan.	2023	V	V	Aktif
45..	KAK Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Memuat suatu dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran yang akan dicapai kegiatan Pemberdayaan Perlindungan masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum.	2023	V	V	Aktif
43.	KAK Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga danm kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Memuat suatu dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran yang akan dicapai Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga danm kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2023	V	V	Aktif



44.	KAK Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Memuat suatu dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran yang akan dicapai Sub kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	2023	V	V	Aktif
45.	KAK Sub Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.	Memuat suatu dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran yang akan dicapai Sub kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.	2023	V	V	Aktif
	KAK Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Memuat suatu dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran yang akan dicapai sub kegiatan Pengembangan Kapasitas dan karier PPNS	2023	V	V	Aktif
	KAK Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan perlindungan Masyarakatr termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa HAM	Memuat suatu dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran yang akan dicapai sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan perlindungan Masyarakatr termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa HAM	2023	V	V	Aktif
	KAK SOP Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Memuat suatu dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran yang akan dicapai Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	2023	V	V	Aktif



**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI BALI TAHUN 2023**

No	Judul Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Batas Waktu Pengecualian
			Informasi dibuka	Informasi ditutup	
1.	Informasi yang berisi data pribadi Data Kepegawaian Data Pribadi Pelaku Usaha / Dunia Usaha	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, huruf h, huruf i dan huruf j	Mengungkap data pribadi Melanggar HAM	Melindungi Data yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Informasi yang mengungkap proses pemeriksaan internal	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, huruf h, huruf a dan huruf j Peraturan pemerintah No 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah	Menghambat jalannya Proses kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu Badan publik dalam melaksanakan kebijakan	Sampai menjadi laporan pemeriksaa n
3.	Informasi yang mengungkap proses penegakan hukum - jadwal rencana kegiatan yustisi dan non yustisi - Informasi terkait kasus yang masih proses hukum - Data terkait proses penyidikan dan penyidikan tindak pelanggaran perda/perkada dan non yustisi. - Jadwal Pengamanan Pejabat Negara (Gubernur / Wakil Gubernur dan Tamu)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, huruf h, huruf a dan huruf j Peraturan pemerintah No 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah	Menghambat proses penegakan hukum, seperti penghilangan barang bhukti  Mengganggu keamanan saat pengamanan pejabat Bupati & Wakil Bupati - Mengganggu teknik intelejen dan informasin perjalanan pejabat Bupati & Wakil Bupati dalam rangkaian pengamanan tertutup	Membantu Badan publik dalam melaksanakan penegakan hukum. Menjamin keselamatanda n keamanan Pejabat Bupati dan Wakil Bupati	Sampai proses penegakan hukum selesai
4.	Disposisi Surat Pimpinan	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat Mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamanka n proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut dari Satuan Kerja Perangkat Daerah pengolah surat
5.	Surat Pengaduan Masyarakat dan- Menjaga informasi yang menurut Undang-undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak bolehdiungkap	asal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat merugikan proses penyusunan dan -Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang – undang lainnya dirahasiakan /dan atau tidak boleh diungkap	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat	Tidak Terbatas



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**KEPALA SATUAN**  
**I Dewa Nyoman Rai Dharmadi**  
NIP. 19721216 199803 1 006



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE